

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kemiskinan**

Secara umum, kemiskinan dapat dikatakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atas setiap aspek kehidupan. Kemiskinan di identifikasikan sebagai pola hidup yang rendah, yaitu keadaan di mana kehidupan penduduk yang ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokoknya. Menurut BPS (2019) secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Dilihat dari definisi yang sangat luas ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, serta dimensi ruang dan waktu.

Menurut Bappenas (2014) kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak – hak dasar yaitu :

1. Terpenuhiya kebutuhan pangan
2. Rasa aman dari tindak kekerasan
3. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik
4. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanian, sumber daya alam dan lingkungan.

##### **a. Faktor Penyebab Kemiskinan**

Ada beberapa penjelasan mengenai penyebab kemiskinan, salah satunya adanya keterbelakangan perekonomian pada suatu wilayah. Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan yang terjadi di negara – negara berkembang diakibatkan karena interaksi berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang terbilang masih rendah dan laju pertumbuhan ekonominya
  2. Pendapatan per kapita di negara berkembang masih rendah dan pertumbuhannya masih lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
  3. Distribusi pendapatan masih timpang atau belum merata.
  4. Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
  5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan sangat terbatas, kekurangan gizi dan menyebarnya wabah penyakit membuat tingkat kematian bayi di negara – negara berkembang meningkat.
  6. Fasilitas pendidikan seperti isi kurikulum di kebanyakan negara – negara berkembang relatif masih kurang relevan dan kurang memadai.
- b. Macam – Macam Kemiskinan

Menurut Arsyad (1997) ada beberapa macam kemiskinan antara lain :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diukur dari pendapatan seseorang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan minimum. Seseorang yang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mencapai keberlangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diukur dari pendapatan seseorang dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya.

Besar-kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Kuncoro (2015) semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Menurut konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) BPS (2019) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu :

1. *Head Count Index*

Merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

c. Garis Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2019) menggunakan Garis Kemiskinan (GK) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan. Apabila suatu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah suatu Garis Kemiskinan maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis kemiskinan Non Makanan (GNKM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan yang disamakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan ini diwakili oleh 52 jenis komoditi, antara lain : padi-padian, umbi-umbian, ikan, telur, daging, sayuran, susu, kacang-kacangan, buah-buahan, serta minyak dan lemak. Sedangkan GNKM merupakan kebutuhan minimum untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan ini diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Perhitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Berikut formula dasar untuk mencari nilai GKM atau nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan. Pada kasus ini sebelum disetarakan kedalam 2100 kilokalori perhari sebagai berikut :

$$GKM *_{JP} = \sum_{K=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

$GKM *_{JP}$  = Garis kemiskinan makanan dari suatu daerah  $j$  (sebelum disetarakan kedalam 2100 kilokalori) untuk provinsi  $p$ .

$P_{jkp}$  = Rata – rata harga untuk komoditi  $k$  di daerah  $j$  dan provinsi  $p$ .

$Q_{jkp}$  = Rata – rata kualitas untuk komoditi  $k$  yang dikonsumsi di daerah  $j$  pada provinsi  $p$ .

$V_{jkp}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi  $k$  di daerah  $j$  provinsi  $p$ .

$j$  = Daerah (perkotaan ataupun wilayah yang diambil sampel)

Setelah nilai dari  $GKM_j$  didapatkan, maka selanjutnya nilai tersebut akan disetarakan dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata – rata kalori menurut daerah  $j$ , berikut persamaan yang didapatkan :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana:

$K_{jkp}$  = Kalori dari komoditi  $k$  pada daerah  $j$  di provinsi  $p$

$\overline{HK}_{jp}$  = Harga rata –rata kalori di daerah  $j$  pada provinsi  $p$

Selanjutnya adalah bentuk formulan untuk mencari kebutuhan minimum atau kebutuhan minimum dari GKNM:

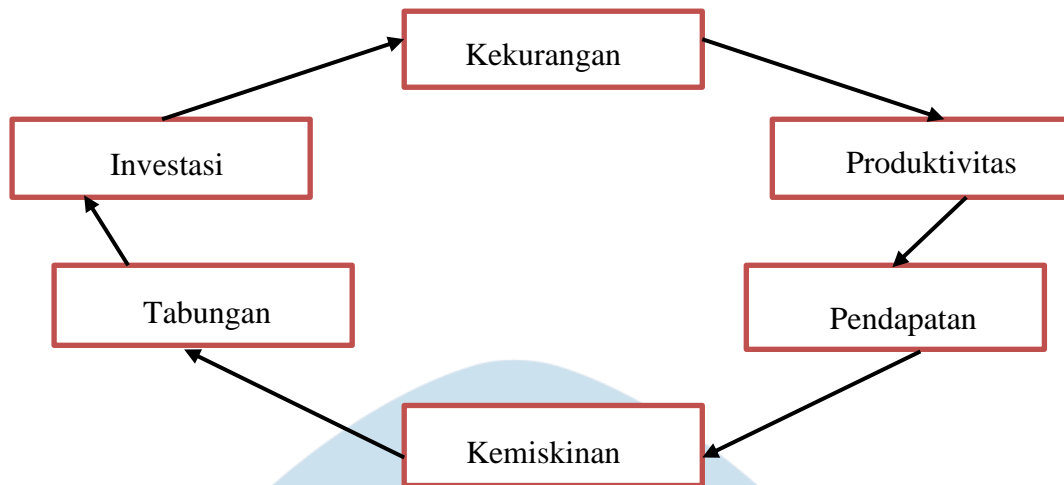
$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} v_{kjp}$$

Dimana :

|             |  |
|-------------|--|
| $GKNM_{jp}$ | = pengeluaran minimum untuk garis kemiskinan atau non makanan di daerah $j$ dan provinsi $p$           |
| $v_{kjp}$   | = nilai pengeluaran untuk setiap komoditi atau bagian kelompok non makanan daerah $j$ dan provinsi $p$ |
| $r_{kj}$    | = Rasio pengeluaran untuk setiap komoditi atau bagian kelompok non makanan daerah $j$ dan provinsi $p$ |
| $k$         | = Jenis komoditi non makanan yang dipilih  |
| $j$         | = Daerah (wilayah yang diambil sampel)   |
| $p$         | = Provinsi ke- $p$   |

Menurut Sharp *et al.* (1996) dalam Kuncoro (1997) mengemukakan penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena terdapat ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang jumlahnya terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah yang menyebabkan upahnya juga rendah. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung serta adanya diskriminasi. Ketiga, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab ini berasal pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Rendahnya produktivitas terjadi karena adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal. Di mana hal ini mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, menurut Kuncoro (2006) setiap upaya untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.



Sumber: Kuncoro (2006)

**Gambar 2. 1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan**

#### d. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemerintah tentu memiliki berbagai kebijakan, strategi serta upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Strategi yang dianggap paling tepat dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai pada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Menurut Arsyad (2015) salah satu strategi yang digunakan untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan adalah peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Adanya kemampuan fleksibilitas dan pengetahuan yang dimiliki LSM dipercaya mampu menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif daripada program – program pemerintah. Pemerintah menjadikan organisasi – organisasi sosial di masyarakat sebagai mitra

kerja dengan tujuan untuk merealisasikan kebijakan Dana Desa agar meningkatkan kegiatan ekonomi yang berbasis masyarakat yang berdaya.

Selain itu juga ada beberapa program yang diselenggarakan pemerintah RI untuk mengentaskan kemiskinan antara lain :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga yang berhak menerima PKH. Adanya program PKH ini membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar masyarakat. PKH juga mulai dimanfaatkan untuk mencakup pelayanan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dari Presiden RI. Program ini diketahui cukup membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan (Kemos, 2018).

2. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Menurut Maliangga (2019) Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Program ini diketahui dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan.

3. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kebijakan Kartu Indonesia (KIP) adalah program pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena terkendala biaya. Siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin ini sangat membutuhkan KIP, karena mereka sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga berakibat siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Program ini diketahui dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan (Maliangga, 2019).

### 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian, dimana barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makro ekonomi. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang membuat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya (Sadono, 2010).

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mankiw (2007) output barang dan jasa perekonomian digunakan untuk menghitung ukuran kemakmuran ekonomi dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga. Dalam hal ini ekonom menggunakan PDB riil yang nilai barang dan jasanya diukur menggunakan harga konstan. PDB riil dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PDB Riil} = \text{Output yang diproduksi pada tahun tertentu} \times \text{Harga tahun dasar}$$

Selain GDP riil alat ukur lain adalah GDP nominal. GDP nominal adalah alat yang digunakan untuk mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga – harga di masa sekarang. Kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi adalah hal yang mempengaruhi menghitung PDB nominal. Untuk mengetahui perhitungan PDB nominal ini maka harus mengetahui perhitungan PDB deflator. PDB deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh ekonom untuk mengamati rata – rata tingkat harga dalam perekonomian. PDB deflator mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Menurut Mankiw (2007) berikut rumus untuk menghitung PDB deflator dan PDB nominal :

$$\text{PDB deflator} = \frac{\text{PDB Nominal}}{\text{PDB Riil}}$$

$$\text{PDB Nominal} = \frac{\text{PDB Riil}}{\text{PDB Deflator}}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah data untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa



akhir yang dihasilkan dari seluruh kegiatan di suatu daerah dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Menurut Sukirno (2005) membagi PDRB menjadi 2 bentuk yaitu:

- 1) PDRB atas dasar harga konstan. Menurut BPS definisi PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap, dimana nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
- 2) PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut BPS definisi PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

### **2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

*The United Development Program* (UNDP) menjelaskan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan penting masyarakat, seperti pilihan berumur panjang yang sehat, mendapat pendidikan yang cukup dan menikmati standar hidup yang layak. Ukuran alternatif kesejahteraan menurut UNDP yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Arsyad (2010) IPM merupakan suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yaitu pendidikan, kesehatan dan standar kehidupan.

Ada beberapa komponen yang dilihat dalam mengukur IPM didasarkan pada komponen dasar kualitas hidup, yaitu angka melek huruf, angka harapan hidup serta rata-rata lama sekolah dan standar kehidupan yang layak (Kuncoro, 2009). Kategori IPM ditetapkan berdasarkan pada skala 0,0-0,10 yang terdiri dari:

- 1) Kategori rendah: nilai IPM 0,0-0,5
- 2) Kategori menengah: nilai IPM antara 0,51-0,79
- 3) Kategori tinggi: nilai IPM 0,8-1

## Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

### a. Umur Panjang (*longevity*)

Menurut Hakim (2002) umur panjang sebagai pengukur nutrisi dan kesehatan. Umur panjang dapat diukur dengan rata-rata harapan hidup (dalam tahun) dari tingkat kelahiran, hal ini dihitung dengan mengasumsikan bahwa seorang bayi lahir dalam satu tahun tertentu akan mengalami kematian seketika dari tiap kelompok umur sepanjang hidupnya.

### b. Pendidikan

Dalam perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM), ada dua indikator untuk mengukur komponen tingkat pendidikan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (Hakim, 2002). Angka melek huruf dilihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bisa membaca dan menulis. Sedangkan rata-rata lama sekolah dilihat dari rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung menggunakan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang diduduki.

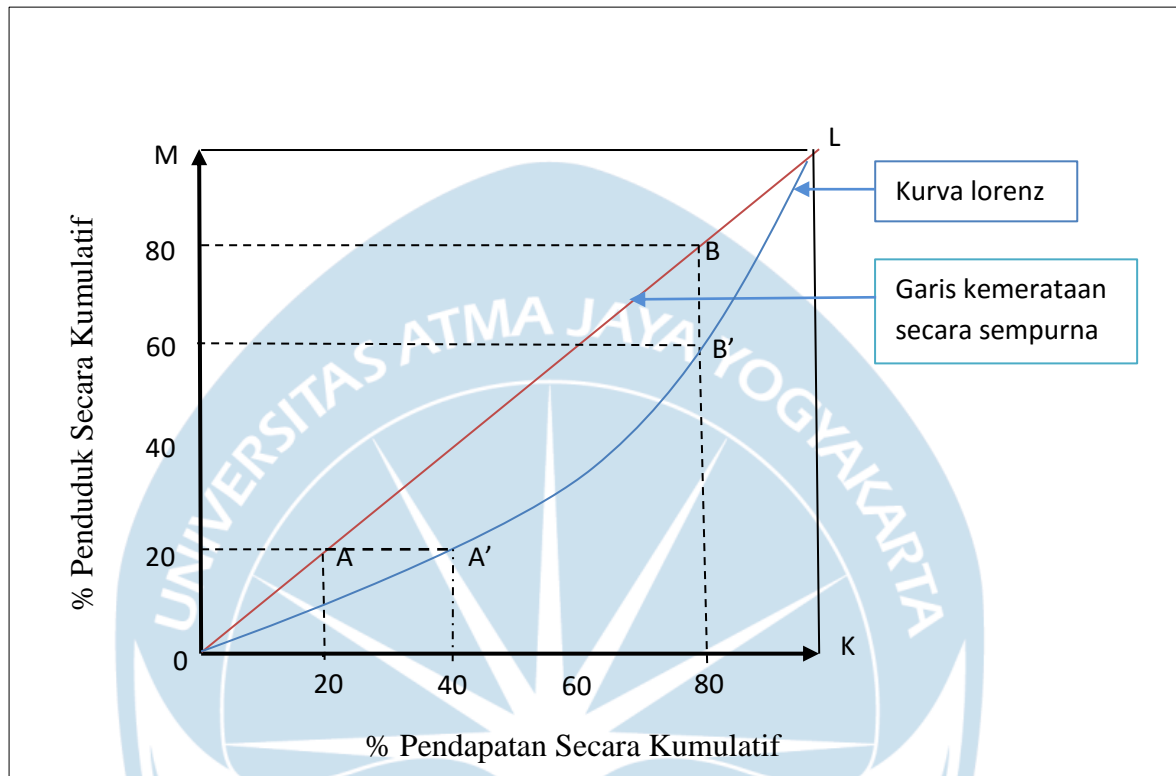
### c. Standar Hidup

Menurut Todaro dan Smith (2011) standar kehidupan yang diukur menggunakan pendapatan riil perkapita, harus disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan memenuhi asumsi utilitas marginal yang semakin menurun dari pendapatan. Standar hidup yang tinggi dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang tinggi, rendahnya ketimpangan pendapatan, kesehatan yang baik, serta sistem pendidikan yang memadai dan berkualitas.

#### **2.1.4. Gini Ratio**

Menurut BPS (2022) Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu. Koefisien Gini atau *Gini Ratio* merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan). Ukuran *Gini Ratio* sebagai

ukuran pemerataan pendapatan yang memiliki nilai 0 yang berarti menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.



Sumber : Todaro dan Smith (2011)

**Gambar 2. 3**  
**Kurva Lorenz**

Indikator ketimpangan menurut Bank Dunia (*World Bank*)

Menurut BPS (2022) Ukuran Bank Dunia merupakan salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Beberapa kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia sebagai berikut :

- 1) Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima  $< 12\%$  dari total pendapatan, maka termasuk dalam tingkat ketimpangan tinggi.
- 2) Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima  $12\% - 17\%$  dari total pendapatan, maka termasuk dalam tingkat ketimpangan sedang.
- 3) Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima  $> 17\%$  dari total pendapatan, maka termasuk ke dalam tingkat ketimpangan rendah.

## **2.2. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

Hubungan antar variabel menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis dan mengacu pada penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan membahas hubungan antara variabel independen, yaitu kemiskinan dengan ketiga variabel dependen, yaitu PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan *Gini Ratio*.

### **2.2.1. Hubungan Antara PDRB Terhadap Kemiskinan**

Menurut Tambunan (2003) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama yang penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja berdampak ketimpangan dalam pembagian dan penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang kemudian akan mengakibatkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Menurut Kuncoro (1997) pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan menyebar secara rata ke lapisan masyarakat. Apabila PDRB suatu daerah menurun akan berdampak pada kualitas dan konsumsi rumah tangga. Ketika pendapatan penduduk menurun, rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang sedikit juga.

Menurut penelitian yang dilakukan Hidayana (2009) yang menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

### **2.2.2. Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. IPM memiliki indikator komposit dalam perhitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Adanya peningkatan pada sektor kesehatan, pendidikan, serta pendapatan per kapita akan mendorong kontribusi bagi

pembangunan kualitas manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia di suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut, hal ini berarti IPM mempunyai hubungan yang negatif terhadap kemiskinan. Setiap IPM mengalami kenaikan akan menurunkan tingkat kemiskinan (Napitupulu, 2007).

Menurut Todaro dan Smith (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia memegang peran kunci dalam mendorong kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia suatu daerah maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Paizal *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap penduduk miskin. Artinya setiap kenaikan IPM akan menurunkan tingkat penduduk miskin. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mendorong pembangunan kualitas manusia untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

### **2.2.3. Hubungan Antara *Gini Ratio* Terhadap Kemiskinan**

Tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang tinggi, distribusi pendapatan yang kurang merata tidak akan ada perubahan dalam tingkat kemiskinan. *Gini ratio* diukur secara grafis dengan membagi bidang yang terletak diantara garis pemerataan sempurna dan kurva lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan dalam diagram lorenz. Semakin tinggi nilai *gini ratio* semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah *gini ratio* maka semakin rendah pula distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2011)

Menurut penelitian yang dilakukan Sugiyarto *et al.* (2015) menyatakan kesenjangan bisa membuat kondisi kemiskinan semakin parah atau bisa diartikan kesenjangan dalam bentuk kemiskinan. Salah satu indikator yang dapat mengukur ketimpangan adalah menggunakan *Gini Ratio*. Jika nilai *Gini Ratio* semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan dikatakan merata. Sebaliknya, jika nilai *Gini Ratio* semakin mendekati 1 maka distribusi pendapatan semakin terjadi ketimpangan. Semakin tidak meratanya distribusi pendapatan bisa mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan dengan kondisi ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan.

### 2.3. Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Suharlina (2020) yaitu Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi, pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama lima tahun, dengan metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan data panel. Hasil penelitian diperoleh bahwa investasi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, serta kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Suropto dan Lalu (2020) yaitu Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I Yogyakarta Periode 2010 – 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data panel, yang terdiri dari data deret waktu selama periode 2010-2017 dan data cross section 5 Kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan model efek tetap. Hasil dalam penelitian diperoleh tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (2) variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan; (3) Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; (4) Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Putra *et al.* (2021) yaitu Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, *Gini Ratio* dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Blitar Tahun 2011-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, *Gini Ratio* dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2011-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear

berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan bentuk data time series. Hasil analisis menunjukkan variabel Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Variabel Gini Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Variabel Pertumbuhan PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan. Pemerintah Kota Blitar dalam menanggulangi kemiskinan harus komprehensif dan berkesinambungan. Pelaksanaan program atau bantuan harus tepat sasaran agar dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Blitar.

Penelitian yang dilakukan Rahmadi dan Parmadi (2019) yaitu Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing pulau di Indonesia. Untuk menjawab tujuan tersebut di gunakan regresi data panel (pooled data). Hasil penelitian menunjukkan: (1). Regresi terbaik pada model estimasi didasarkan pada uji Chow dan Hausman menggunakan model estimasi Fixed Effect Model untuk setiap pulau di Indonesi. (2). Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi disemua pulau yang ada di Indonesia selama tahun 2015-2018.

Penelitian yang dilakukan Indrawati *et al.* (2020) yaitu Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua tahun 2014-2019. Dalam penelitian ini membahas faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua yang meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen dalam kurun waktu 2014-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model fixed effect dengan jumlah data cross section sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan data time series sebanyak 6 tahun. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan, dan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2014 sampai 2019.